

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi menjadi sebuah hal yang penting bagi manusia. Dengan komunikasi yang baik dan juga efektif memungkinkan terbangunnya hubungan yang baik diantara manusia itu sendiri. Selain itu dengan berkomunikasi juga membantu kita dalam memahami setiap karakter individu. Komunikasi bisa dijalin secara lisan atau verbal maupun secara visual. Secara lisan komunikasi bisa dijalin dengan percakapan antara satu dengan yang lainnya dan biasanya dilakukan dengan jarak yang relatif dekat, lalu bagaimana cara berkomunikasi tetapi jarak yang ada sangatlah jauh? Dahulu kala komunikasi dengan jarak yang jauh bisa dilakukan dengan cara berteriak dan teriakan ini akan diteruskan kepada yang lainnya, atau bisa juga dilakukan dengan gendrung gong atau bahkan juga dengan api/asap. Seiring berkembangnya zaman komunikasi jarak jauh berkembang dengan menjadikan surat sebagai medianya, dan pengantar surat tersebut biasanya merupakan seorang *abdi* atau pesuruh kerajaan, mungkin yang pada masa kini kita kenal dengan istilah kurir. Biasanya surat diantarkan dengan cara beranting antara satu kurir dengan kurir lainnya, bisa dengan cara berlari atau dengan menggunakan kuda. Konsep ini di Indonesia sudah dikenal sejak zaman kerajaan, dan sebutlah kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara, dan lain-lain sudah menggunakan konsep ini. Pada zaman kerajaan-kerajaan berikutnya surat untuk kerajaan lain atau hanya sekedar surat pribadi terkadang dititipkan saudagar atau pedagang yang memang dapat dipercaya.¹

Seiring dengan kedatangan VOC pada tahun 1602 surat-menyurat yang dikirim dari Belanda ataupun sebaliknya pun terjadi, pada masa tersebut kegiatan komunikasi lewat surat mulai diorganisirkan. Untuk memaksimalkan sistem komunikasi lewat surat maka pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal G. W. Baron Van Imhoff yakni pada tahun 1746 kantor pos pertama didirikan, tepatnya

¹ Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia : Jilid I Masa Pra Republik*, 1980, 1-3.

didirikan di Jakarta. 4 tahun kemudian didirikan kembali sebuah kantor pos di wilayah Semarang, ini berguna untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat sistem pengiriman. Di mana untuk rute pengirimannya adalah melalui Karawang, Cirebon dan Pekalongan.² Sistem perposan mulai dikembangkan kembali oleh Pemerintahan Belanda, ini dilakukan menyusul VOC yang mengalami kebangkrutan. Lampiran Staatsblads tahun 1847 menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-19 jaringan layanan pos di Pulau Jawa dan Madura telah terbentuk luas, mencakup wilayah dari Tjiringien (Caringin, Banten) hingga Banjoewangie (Banyuwangi). Hal ini menandakan bahwa sistem perposan memiliki fungsi vital dalam perannya sebagai sarana komunikasi.³

Pada sekitar tahun 1906 – 1908, Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda melakukan penggabungan terhadap beberapa jawatan yang sebelumnya menangani layanan pos, telegraf, dan telepon secara terpisah. Penggabungan tersebut kemudian melahirkan sebuah jawatan baru, yakni Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau Jawatan PTT. Dengan demikian, Jawatan PTT merupakan hasil dari sebuah penggabungan dari tiga jawatan sebelumnya, yaitu Jawatan Pos, Jawatan Telegraf, dan Jawatan Telepon.⁴ Penggabungan serta pembentukan Jawatan PTT dapat dipandang sebagai usaha serta upaya dari Pemerintah Kolonial untuk menempatkan ketiga bidang yang cukup saling berkaitan tersebut ke dalam satu struktur “tubuh” yang sama.

Bandung memiliki keuntungan geografis dan ekologis yang menjadikannya berbeda dengan kota-kota pesisir seperti Batavia. Letaknya di dataran tinggi menjadikan udara Bandung lebih sejuk dan berkualitas sehingga menjadikan lingkungannya lebih baik. Kondisi ini kemudian menjadi *concern*

² Telekomunikasi, 5.

³ “*Staatsblads Van Nederlandsch-Indie 1847*,” 1847; Direktorat Pengolahan Arsip Nasional Republik Indonesia, “*Inventaris Arsip Post-, Telegraaf-En Telefoondienst*,” 2018, 1–2.

⁴ Landsdrukkerij, “*Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie 1908 Tweede Gedeelte : Kalender En Personalie*” (Batavia, n.d.), IX; Sudarsono Katam, *Gedung Sate Bandung*, 1st ed. (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2009), 102–103.

bagi beberapa ahli, salah satunya ialah H.F. Tillema seorang apoteker berkebangsaan Belanda. Ia menilai bahwa Batavia tidak layak menjadi ibu kota untuk Hindia Belanda, ketidakhigienisan hingga berpotensi mendatangkan penyakit menjadi alasan Tillema untuk menggagas pemindahan ibu kota ke daerah yang lebih sejuk dan berkualitas, yakni Bandung. Namun gagasan atau usulan dari Tillema ini diabaikan oleh Pemerintahan Hindia-Belanda, meskipun demikian seorang Professor bernama J. Kloppe menaruh perhatian pada gagasan Tillema ini. Ia mengembangkan serta mengusulkan kembali ide pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Dan nampaknya kali ini gagasan pemindahan ibu kota digubris oleh Pemerintahan Hindia-Belanda, ini nampak dari adanya pemindahan beberapa dinas atau lembaga negara ke Bandung pada tahun 1916. Dan salah satu dinas atau lembaga negara yang berpindah ke Bandung adalah Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT).⁵

Pemindahan Dinas Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari Batavia ke Bandung tidak serta-merta berlangsung secara menyeluruh, melainkan dilakukan secara bertahap. Namun, pada tahap ini, pemindahan tersebut masih bersifat parsial karena sebagian kegiatan administratif dan koordinatif tetap dilakukan di Batavia hingga beberapa tahun berikutnya. Kantor Pusat PTT di Bandung benar-benar berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh jaringan komunikasi pos dan telegraf di Hindia Belanda.

Pada masa pemerintahan Jepang jawatan PTT terpecah mengikuti struktur organisasi pemerintah militer Jepang yang pada saat itu dibagi ke dalam tiga kawasan administratif yakni Sumatera, Jawa, dan kepulauan lainnya. Untuk PTT sendiri terdapat jawatan PTT Sumatera yang berlokasi di *Shonanto* (Singapura), Jawa dan Madura tetap berkedudukan di Bandung, dan untuk Sulawesi ada di Makassar.⁶ Salah satu keuntungan atau dampak positif di mana PTT di masa

⁵ Katam, *Gedung Sate Bandung*; Yan Nurcahya et al., “Perkembangan Kota Bandung Pada Masa Kolonial Abad Ke-19,” *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia* 1, no. 1 (2025): 43–54, <https://doi.org/10.63822/j9fp6691>.

⁶ Arsip Nasional Republik Indonesia, “*Inventaris Arsip Post-, Telegraaf-En Telefoondienst*,” 9.

Jepang adalah pemerintah Jepang pada saat itu mengizinkan untuk pribumi menduduki kantor-kantor sebagai tenaga tenaga pekerja, sehingga hal ini memudahkan bangsa Indonesia dalam merebut kantor PTT di Indonesia karena setidaknya mereka sudah memiliki pengalaman untuk bekerja serta mengelola kantor PTT.⁷

Menyusul peristiwa proklamasi bangsa Indonesia pada Agustus 1945, para pemuda yang bergabung pada AMPTT (Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon) memiliki semangat untuk merebut kembali kantor Pos pusat PTT di Bandung yang pada saat itu masih dikuasai oleh Jepang. Maka pada tanggal 27 September 1945 para pemuda yang tergabung AMPTT dengan semangat kemerdekaan dan siap berkorban akhirnya memutuskan untuk merebut kantor pos pusat PTT di Bandung.⁸

Secara spasial penelitian ini berfokus pada Kantor Pusat Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dari mulai gedung yang digunakan untuk beroperasi hingga pada perkembangannya. Adapun secara temporal pemilihan waktu ialah rentang antara tahun 1920 – 1945, hal ini dipilih karena antara rentang waktu tersebut Kantor Pusat Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) mengalami masa yang berbeda, dari masa konsolidasi birokrasi oleh Kolonial Belanda, berlanjut pada masa reorganisasi pada masa Pendudukan Jepang, hingga pada masa awal kemerdekaan, dimana Kantor Pusat Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dinilai sebagai salah satu objek strategis yang perlu “diamankan” dan berhasil direbut oleh Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (AMPTT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Herman Effendy, “Angkatan Muda Pos Telegraf Dan Telepon (AMPTT) Bandung Pada Awal Masa Revolusi 1945 - 1946” (Universitas Indonesia, 1993), 14–16.

⁸ Effendy, 67–70; Djen Amar, *Bandung Lautan Api* (Bandung: Penerbit Dhiwantara, 1963).

1. Bagaimana pembangunan gedung Kantor Pusat Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) di Bandung (1920 - 1924)?
2. Bagaimana dinamika Kantor Pusat Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) pada masa Belanda dan Jepang (1924 – 1945)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembangunan gedung Kantor Pusat Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) di Bandung (1920 - 1924).
2. Untuk mengetahui dinamika Kantor Pusat Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) pada masa Belanda dan Jepang (1924 – 1945).

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas kajian kepustakaan dengan mencari karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi, selain itu majalah dan koran pun bisa menjadi sebuah kajian dalam aktivitas ini. Tujuan dari tahapan tinjauan pustaka adalah untuk mencari tulisan karya ilmiah yang memiliki bahasan yang sama dengan bahasan yang akan peneliti teliti. Tahapan kajian pustaka ini juga bisa menjadi sebuah ajang bagi peneliti untuk membuktikan keorisinalitasan penelitian. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa kajian teks yang relavan dengan topik masalah yang dibahas. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) Bandung pada Awal Masa Revolusi 1945 – 1948” yang ditulis oleh Herman Effendy pada tahun 1993. Persamaan antara skripsi dengan karya tulis akan dibuat oleh penulis nanti ialah sama-sama membahas tentang Pos Telegerap dan Telepon, akan tetapi terdapat perbedaan dalam menentukan atau membahas objek penelitian. Skripsi Herman Effendy ini menjadikan Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) sebagai objek penelitian, dan memang dalam skripsi nya

beliau membahas AMPTT serta perannya dalam masa kemerdekaan.⁹ Sementara karya tulis penulis akan menempatkan Kantor Pusat PTT di Bandung sebagai objek pembahasan, dari mulai berdirinya, operasional pada masa Belanda dan Jepang, hingga akhirnya direbut oleh AMPTT pada masa kemerdekaan.

2. Skripsi berjudul “Perkembangan PT POS di Kota Bandung tahun 1945 - 2007” yang ditulis oleh Karunia Pangrena pada tahun 2014. Perbedaan karya tulis penulis dengan skripsi ini terletak pada fokusnya, dimana skripsi ini berfokus pada perkembangan dinamika PT POS di Kota Bandung dengan meng-highlight perkembangan dari cara pelayanan juga upaya PT POS di Kota Bandung dalam merespon kemajuan zaman terutama dalam bidang teknologi.¹⁰ Perbedaan antara skripsi ini dengan karya tulis yang akan ditulis nanti terletak pertama pada tahun dan kedua pada fokus kajiannya. Karya tulis penulis nanti akan berfokus pada tahun 1928 hingga 1945 dan berfokus pada kegiatan operasional Kantor PTT Pusat di Bandung hingga pada perebutannya oleh AMPTT (Angkatan Muda Pos, Telegrap, dan Telepon).
3. Artikel berjudul “Arsitektur Kolonial Tropis di Bandung : Sebuah Interaksi Multikultur (1906 – 1925)” yang ditulis oleh Dina Amelia, Umasih, dan Nur’aini Marta. Artikel ini membahas bagaimana rancangan serta eksekusi dari rencana pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung, dengan menonjolkan hegemoni kekuasaan berupa bangunan berciri khas *Indo – Imperialis*.¹¹ Persamaan antara artikel ini dengan karya tulis akan dibuat oleh penulis nanti ialah membahas rancangan atau proyek pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Namun

⁹ Effendy, “*Angkatan Muda Pos Telegrap Dan Telepon (AMPTT) Bandung Pada Awal Masa Revolusi 1945 - 1946*.”

¹⁰ Kurnia Pangrena, *Perkembangan Pt.Pos Di Kota Bandung Tahun 1945-2007* Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu” (2014).

¹¹ Dina Amelia, Umasih, and Nur’aini Marta, “*Arsitektur Koloniaal Tripis di Bandoeng : Sebuah Interaksi Multikultur (1906-1925)*,” *PERIODE : Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 3, no. 1 (2021): 42–63.

perbedaan antara artikel ini dengan karya tulis yang akan ditulis nanti terletak pertama pada tahun, dimana penulis menjadikan rentang tahun 1928 – 1945 sebagai fokus kajian, dan kedua terletak pada fokus pembahasan. Artikel Dina Amelia, dkk berfokus pada pemindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung, sementara karya tulis penulis lebih berfokus pada sejarah perkembangan dari Kantor Pusat Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT).

4. Artikel berjudul “Kota Kolonial Hindia Belanda 1800 – 1942 : Ditinjau dari Permasalahan Sejarah Perkotaan” karya Dewi Ratih. Artikel ini membahas kota-kota di Hindia Belanda yang salah satunya adalah Bandung dengan salah satunya menyoroti bagaimana kota-kota tersebut dibangun dengan kehendak mereka yang berorientasi pada kepentingan kolonial saja.¹² Persamaan antara artikel ini dengan karya tulis penulis ialah membahas Bandung sebagai hasil kebijakan administratif pemerintahan Hindia Belanda. Di samping itu perbedaan antara artikel ini dengan karya tulis penulis pertama terletak pada tahun, dimana penulis menjadikan rentang tahun 1928 – 1945 sebagai fokus kajian, dan kedua adalah penulis menempatkan pembahasan Kota Bandung sebagai hasil kebijakan administratif pemerintahan Hindia Belanda sebagai pembahasan latar belakang untuk membahas masalah inti, yakni sejarah perkembangan dari Kantor Pusat Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT).
5. Buku berjudul “Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I : Masa Pra Republik” karya Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Buku ini membahas tentang perkembangan Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) selama masa sebelum kemerdekaan, yaitu dari masa VOC, Kolonial Belanda, hingga Pendudukan Jepang. Persamaan karya tulis ini dengan buku Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I ini terletak pada objek dan batasan waktu penelitian, di mana pembahasan sama-sama mengenai

¹² Dewi Ratih, “Kota Kolonial Hindia Belanda 1800 - 1942 : Ditinjau Dari Permasalahn Sejarah Perkotaan,” *Jurnal Artefak* 9, no. 1 (2022): 47–60.

sejarah Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) sebagai bagian dari perkembangan layanan komunikasi di Indonesia. Selain itu, keduanya menggunakan periode sebelum kemerdekaan sebagai batas waktu kajian, sehingga pembahasan dalam kedua karya sama-sama mencakup perkembangan Jawatan PTT pada masa pemerintahan kolonial hingga masa pendudukan Jepang. Di samping itu, perbedaan antara karya tulis ini dengan buku Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia Jilid I terletak pada fokus pembahasan yang lebih khusus. Buku Sejarah Pos Jilid 1 membahas sejarah Jawatan PTT secara lebih luas, sedangkan skripsi ini memberikan porsi yang lebih besar terhadap Kantor Pusat PTT, khususnya setelah kantor tersebut dipindahkan ke Bandung. Skripsi ini juga membahas struktur Kantor Pusat PTT untuk melihat susunan organisasi serta kedudukan dan fungsi bagian-bagian yang berada di dalamnya. Selain itu, skripsi ini membandingkan keberlanjutan dan perubahan fungsi Kantor Pusat PTT antara masa kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang.

E. Metode Penelitian

Peneliti sejarah dalam melakukan sebuah penelitian sejarah haruslah menggunakan sebuah tata acara yang bisa diibaratkan seperti “aturan main” atau dikenal juga sebagai metode. Metode penelitian sejarah ini mencakup tahapan seperti pencarian dan pengumpulan sumber, menganalisis ke-kredibilitasan sumber, menganalisis data yang terdapat pada sumber, dan terakhir ditutup dengan penulisan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Adapun empat tahapan dari metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut :

1. Heuristik

Dilihat dari arti katanya, heuristik memiliki makna mencari, menemukan, atau memperoleh. Dalam penelitian sejarah penting bagi sejarawan untuk mencari serta memperoleh informasi-informasi atau data-

data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.¹³ Dan pencarian nya bisa dilakukan di berbagai tempat, entah itu di perpustakaan, lembaga arsip, museum, dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi menyimpan benda sejarah.¹⁴ Selanjutnya yang perlu diperhatakian adalah tahapan heuristik ini berpotensi memakan waktu yang lama, maka ada baiknya seorang sejarawan untuk mengklasifikasikan sumber-sumber yang akan digunakan. Menurut Nina Herlina, setidaknya terdapat 3 klasifikasi untuk sumber-sumber, yakni sumber tertulis, sumber benda, dan sumber lisan.¹⁵ Selain diklasifikasian menurut bentuk, sumber-sumber juga bisa diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya, nantinya akan terklasifikasi mana sumber yang primer dan mana sumber yang sekunder.¹⁶ Dan berikut adalah beberapa sumber yang peneliti sudah klasifikasikan berdasarkan bentuk dan juga asal-usulnya.

a. Sumber Primer

1) Dokumen

- a) Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1847 bagian lampiran
- b) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1900 : Tweede Gedeelte.
- c) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1908 : Tweede Gedeelte.
- d) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1921 : Tweede Gedeelte.

¹³ N. Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 110, 2020, 31.

¹⁴ Herlina, 110:32.

¹⁵ Herlina, 110:8.

¹⁶ Herlina, 110:24.

- e) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1922 :
Tweede Gedeelte.
- f) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1924 :
Tweede Gedeelte.
- g) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1925 :
Tweede Gedeelte.
- h) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1926 :
Tweede Gedeelte.
- i) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1927 :
Tweede Gedeelte.
- j) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1928 :
Tweede Gedeelte.
- k) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1929 :
Tweede Gedeelte.
- l) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1930 :
Tweede Gedeelte.
- m) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1931 :
Tweede Gedeelte.
- n) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1934 :
Tweede Gedeelte.
- o) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1935 :
Tweede Gedeelte.
- p) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1936 :
Tweede Gedeelte.

- q) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1937 :
Tweede Gedeelte.
- r) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1938 :
Tweede Gedeelte.
- s) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1940 :
Tweede Gedeelte.
- t) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1941 :
Tweede Gedeelte.
- u) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1942 :
Tweede Gedeelte.
- v) Post-, Telegraaf- en Telefonoongsids voor Nederlandsch-
Indie : Acht en Twintigste Jaargang 1924.

2) Surat Kabar

- a) Bataviaasch Nieuwsblad 1 Agustus 1914.
- b) Asia Raja edisi 11 Mei 1943 Tahoen Ke II – No. 109.
- c) Asia Raja edisi 2 Maret 1944 Tahoen Ke III – No. 54.
- d) Asia Raja edisi 31 Januari 1945 Tahoen Ke IV – No. 27.

b. Sumber Sekunder

1) Buku

- a) Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia : Jilid I Masa Pra Republik. Jakarta : CV Cahaya Makmur.

- b) Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980. Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia : Jilid II Masa Perang Kemerdekaan. Jakarta : CV Cahaya Makmur.
- c) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1985. Tokoh-tokoh Sejarah dan Perjuangan dan Pembangunan Pos dan Telekomunikasi di Indonesia. Jakarta : CV Cahaya Makmur.
- d) Djen Amar. 1963. Bandung Lautan Api. Bandung : Penerbit Dhiwantara.
- e) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. Menabung Membangun Bangsa. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f) Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 2019. Sejarah Nasional Indonesia V : Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (Edisi Pemutakhiran). Jakarta : Balai Pustaka.
- g) Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 2019. Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942 – 1998) (Edisi Pemutakhiran). Jakarta : Balai Pustaka.
- h) Ngadisah. Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi. Universitas Terbuka.
- i) Sudarsono Katam. 2009. Gedung Sate Bandung. Bandung : PT Kiblat Buku Utama.

2) Artikel Jurnal

- a) Ayu Nadira Wulandari, et al. 2024. Masa Pendudukan Jepang di Indonesia. *INNOVATIVE : Journal of Social Science Research*.
- b) Husna Izzati, Andiyan, & Wowo Adizar Darwin. 2023. Filosofi Sunda dalam Konsep Lanskap Bangunan Kolonial di Kota Bandung. *ARSITEKTURA : Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*.
- c) Ken Goto. 2015. Caught in the Middle : Japanese Attitude toward Indonesian Independence in 1945. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- d) Mufidha Brilian Irianti. 2017. Menabur Kebiasaan : Propaganda Menabung Jepang (1941 - 1945). *Lembaran Sejarah*.
- e) Muhammad Gibran Humam Fadlurrahman. 2024. Kota Schoemaker : Kota Bandung di Mata Maestro Arsitek H. P. Berlage (1915 - 1923). *Purbawidya : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*.
- f) Muhammad Wildan Z Rifa'i & Mukhammad Shokheh. 2025. The Last Wall in The Spice Land : The Dutch East Indies Facing Japanese Attack 1942. *Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*.

3) Skripsi

- a) Azura Firdaus Windarastriana. 2025. Kolaborasi dan Perlawanan Masyarakat Belanda Pada Masa Pendudukan Jerman (1940 - 1945). *Universitas Pendidikan Indonesia*.

- b) Herman Effendy. 1993. Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) Bandung pada Awal Masa Revolusi 1945 – 1948. Universitas Indonesia.
- c) Muhammad Gibran Humam Fadhlurrahman. 2023. Perencanaan dan Pembangunan Kota Bandung Menuju Ibu Kota Baru Hindia Belanda (1916 – 1933). Universitas Indonesia.
- d) Shidqiyyah Rakdiati Ediana. 2023. Commies Cursus Bandung 1926 – 1938 : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pegawai Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon di Hindia Belanda. Universitas Sebelas Maret.

4) Artikel Website

- a) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat. Sejarah Gedung Sate Dan Hari Bakti PU. <https://dbmpr.jabarprov.go.id/sejarah-pu>.
- b) Al Johan. 2016. Cerita Tentang Kantor Pusat PT Pos Indonesia Yang Berada Di Bandung. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/aljohan/56c5373e23afb4cc04cc0123/cerita-tentang-kantor-pusat-pt-pos-indonesia-yang-berada-di-bandung?page=all#goog_rewarded.
- c) Yeni Apriyani. 2026. Dari Kolonial Ke Kemerdekaan, Kisah Gedung Kantor Pusat PTT Bandung. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/bandung/berita-lain/2313560/dari-kolonial-ke-kemerdekaan-kisah-gedung-kantor-pusat-ptt-bandung>.
- d) Sejarah Indonesia SMA. Pergolakan Pada Masa Awal

Revolusi.

<https://read.bookcreator.com/JnEm51eHNJQkhOxMR6VU476zxTE3/kXH74nBxR5Cf88P4CBZ-Xw/HJaBMGyDQcSdNSf63H5ZGA-right>.

- e) Surrender of Italy, German, and Japan in World War II.
https://www.ibiblio.org/hyperwar/ETO/Surrender/Axis_Surrender.html?utm.
- f) The Historian of the US Department of State. Directive by President Truman to the Supreme Commander for the Allied Powers in Japan (MacArthur).
<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v07/d390?utm>.

2. Kritik

Setelah sumber-sumber berhasil dihimpun dan diklasifikasikan maka pada tahapan selanjutnya adalah sumber-sumber tersebut akan diuji keasliannya atau kevalidasinya dalam tahapan kritik. Dalam tahapan kritik, nantinya sumber akan diuji apakah ia kredibel atau tidak dengan dilihat dari aspek luar (eksternal) dan aspek dalam (internal).

a. Kritik Eksternal

Untuk menilai sebuah sumber kredibel/otentik atau tidak dari segi aspek luar (eksternal) ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. **Pertama**, adalah memeriksa sumber tersebut otentik atau tidak dengan melihat tanggal dibuat atau dikeluarkannya sebuah sumber. Misal tidak ada tanggal maka sejarawan bisa menggunakan sebuah konsep “*terminus non ante quem*” (titik yang tidak sebelumnya) dan “*terminus non post quem*” (titik yang tidak sesudahnya) untuk mengira-ngira kapan sumber tersebut dibuat atau dikeluarkan. Selanjutnya adalah dengan menganalisis bahan dari bahan sumber tersebut. **Kedua**,

sumber yang digunakan itu adalah asli apakah turunan, utuh ataukah telah diubah-ubah. Sebab apabila sumber yang digunakan termasuk ke dalam sumber turunan, maka ada potensi perubahan dalam sumber tersebut.¹⁷ Berikut adalah kritik eksternal terhadap sumber-sumber yang penulis gunakan :

1) Dokumen

- a) Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1847 bagian lampiran. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 8 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Sumber ini dikeluarkan pada bulan Desember tahun 1847.
- b) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1900. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1064 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1900 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- c) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1908. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1074 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1908 sebagai tahun edisinya.

¹⁷ Herlina, 110:46–48.

Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

- d) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1921. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1166 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1921 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- e) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1922. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1232 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1922 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- f) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1924. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1044 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1924 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

- g) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1925. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1052 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1925 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- h) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1926. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1030 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1926 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- i) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1927. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 968 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1927 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- j) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1928. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari

web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 974 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1928 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

k) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1929. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 938 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1929 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

l) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1930. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 978 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1930 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

m) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1931. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1012 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan

jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1931 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

n) Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie 1934. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 938 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1934 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

o) Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie 1935. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Dinas Sejarah TNI AD dan berbentuk buku fisik dengan jumlah 857 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1935 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

p) Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie 1936. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 936 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman

awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1936 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

- q) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1937. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 976 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1937 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- r) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1938. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1006 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1938 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- s) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1940. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 790 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1940 sebagai tahun edisinya.

Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.

- t) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1941. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Dinas Sejarah TNI AD dan berbentuk buku fisik dengan jumlah 1036 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1941 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- u) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1942. Tweede Gedeelte. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 1078 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Berdasarkan pengamatan pada bagian halaman awal sumber, diketahui bahwa sumber tersebut mencantumkan tahun 1942 sebagai tahun edisinya. Namun tahun tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda waktu penerbitan sumber ini.
- v) Post-, Telegraaf- en Telefoongids voor Nederlandsch-Indie : Acht en Twintigste Jaargang 1924. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 437 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas. Sesuai dengan tahun yang terdapat pada judul juga terdapat keterangan pada halaman cover, dokumen ini diterbitkan pada tahun 1924.

2) Surat Kabar

- a) Bataviaasch Nieuwsblad 1 Agustus 1914. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 24 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas.
- b) Asia Raja edisi 11 Mei 1943 Tahoen Ke II – No. 109. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 2 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas.
- c) Asia Raja edisi 2 Maret 1944 Tahoen Ke III – No. 54. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 2 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas.
- d) Asia Raja edisi 31 Januari 1945 Tahoen Ke IV – No. 27. Sumber ini penulis dapatkan dari web internet dan berbentuk file pdf dengan jumlah 2 halaman, dan kesemua halaman dapat dibaca dengan jelas.

b. Kritik Internal

Kritik internal mengacu pada menguji kepada keabsahan informasi-informasi yang terkandung dalam suatu sumber, apakah sumber tersebut kredibel secara informasi atau tidak? Jawaban itulah yang akan didapat setelah melakukan kritik internal.¹⁸ Dan dalam mempercayai suatu informasi yang terkandung dalam suatu sumber perlu juga yang dinamakan korborasi fakta. Dengan demikian akan didapatkan suatu fakta sejarah yang benar dan valid, sebab data

¹⁸ Heryati, "Pengantar Ilmu Sejarah," *Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan*, 2013, 66, [http://digilib.uinsby.ac.id/20183/7/Pengantar Ilmu Sejarah.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/20183/7/Pengantar%20Ilmu%20Sejarah.pdf).

primernya akan didukung oleh sumber lainnya, baik itu primer juga ataupun sekunder.¹⁹ Berikut adalah kritik internal terhadap sumber-sumber yang penulis gunakan :

1) Dokumen

- a) Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1847 bagian lampiran. Sumber ini berisikan informasi mengenai daerah-daerah di Hindia – Belanda (Indonesia) yang terdapat kantor pos di daerah tersebut, salah satu daerahnya adalah Bandung. Penulis berpendapat bahwa adanya kantor pos di Bandung mengindikasikan bahwa Bandung masuk ke dalam jalur pengiriman pos.
- b) Regeerings Almanak Voor Nederalandsch Indie 1900, 1908, 1921, 1922, 1924 – 1931, 1934 – 1938, dan 1940 - 1942. Tweede Gedeelte. Sumber ini merupakan laporan tahunan yang diantaranya memuat informasi mengenai kepegawaian di Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon.
- c) Post-, Telegraaf- en Telefoongids voor Nederlandsch-Indie : Acht en Twintigste Jaargang 1924. Sumber ini merupakan buku panduan yang dikeluarkan oleh *Hoofdbestuur* PTT dan berisikan panduan dalam melaksanakan layanan pos, telegrap, dan telepon.

2) Surat Kabar

- a) Bataviaasch Nieuwsblad 1 Agustus 1914. Sumber ini berisikan informasi mengenai dibuka kursus

¹⁹ Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*, 110:55.

pendidikan atau pelatihan di Jawatan PTT.

- b) Asia Raja edisi 11 Mei 1943 Tahoen Ke II – No. 109. Sumber ini berisikan informasi mengenai propaganda Jepang tentang menabung. Ini berkaitan dengan program dinas pos, telegrap, dan telepon pada masa pendudukan Jepang yang lebih mengarah pada aspek militer. Salah satu program nya adalah tabungan pos, program ini nampaknya berguna sebagai kas Jepang untuk digunakan dalam berperang.
- c) Asia Raja edisi 2 Maret 1944 Tahoen Ke III – No. 54. Sumber ini berisikan informasi mengenai sekolah urusan pos (*Jawa Tsusin Gakko*) yang nantinya akan bekerja dalam mengurus pekerjaan pos, telegram, wesel, dan tabungan pos. Informasi tersebut dikeluarkan melalui Maklumat *Gunseikan* no. 12 yang disebarluaskan melalui media surat kabar Asia Raja edisi 2 Maret 1944
- d) Asia Raja edisi 31 Januari 1945 Tahoen Ke IV – No. 27. Sumber ini berisikan informasi mengenai dibentuknya satuan khusus dalam “tubuh” PTT yang dinamakan dengan barisan pelopor yang bertugas untuk memperkuat pertahanan PTT mengingat pentingnya peranan PTT pada masa itu.

3. Interpretasi

Interpretasi sumber merupakan tahap yang penting terhadap sebuah penelitian, setelah sumber melewati tahap heuristik dan kritik. Pada tahap ini penulis lebih fokus untuk menggali terhadap data yang ditemukan dan memberikan penjelasan kepada fakta yang ditemukan, interpretasi

sumber mencakup beberapa langkah penting, terutama ketika mencoba menguraikan sebab-akibat atau pengaruh dari peristiwa yang terjadi.²⁰

Tahapan ini menjadi poin penting dalam penelitian sejarah, karena di sinilah kemampuan seorang sejarawan dalam mengungkapkan fakta-fakta sejarah dan objektivitasnya menjadi sangat terlihat. Pada tahap ini, peneliti dihadapkan pada tuntutan untuk mematuhi prinsip kejujuran, karena pada fase ini terdapat potensi subjektivitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yang penulis rasa relevan dengan pokok pembahasan, yang pertama adalah Teori Birokrasi Rasional yang dikemukakan oleh Max Weber. Ia berpendapat bahwa birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling efektif untuk menjalankan sebuah administrasi. Weber juga memandang bahwa sebuah aturan dalam birokrasi haruslah ada, dan setiap anggota yang ada pada birokrasi tersebut haruslah menghormati aturan yang ada, dengan demikian dapat tercipta sebuah legitimasi yang kemudian menjadi dasar utama bagi sebuah birokrasi.²¹

Untuk mewujudkan birokrasi rasional, Weber mengemukakan delapan prinsip sistem otoritas legal, yaitu:

- a. Tugas dijalankan berdasarkan aturan yang berkesinambungan
- b. Pembagian tugas dilakukan menurut fungsi dan kewenangan yang jelas
- c. Jabatan disusun secara hierarkis
- d. Aturan kerja diatur secara teknis dan legal

²⁰ Herlina, 110:30.

²¹ Ngadisah, *Pengertian Dan Teori-Teori Klasik Birokrasi*, n.d., 7–8, <https://share.google/4pouHFtfBTRZudICQ>.

- e. Kepentingan organisasi dipisahkan dari kepentingan pribadi anggota
- f. Jabatan diisi oleh orang yang kompeten, ini berkaitan juga dengan pengangkatan pegawai/pejabat secara objektif
- g. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis
- h. Organisasi dijalankan melalui staf administrasi birokratis yang memiliki otoritas dan tanggung jawab berjenjang.²²

Teori Birokrasi Rasional dari Max Weber penulis rasa relevan dengan pembahasan mengenai Kantor Pusat Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) sebagai sebuah lembaga negara yang menjalankan perannya sebagai psuat administrasi dan pengendalian dalam Jawatan PTT seluruh Hindia Belanda.

4. Historiografi

Setelah semua tahapan mulai dari pencarian, pengujian, serta penafsiran terhadap sumber, maka tahapan yang terakhir ialah tahapan menuliskan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Semua fakta-fakta yang telah kita tafsirkan nantinya akan kita tulis hasil akhirnya, dan dalam tahap ini pula kemampuan seorang sejarawan dalam menulis dan mengarang sangatlah dibutuhkan.²³ Dalam hal ini penulis telah merancang outline dalam rangka menjalankan tahapan kegiatan penulisan sejarah.

BAB I Pendahuluan berisikan uraian latar belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) di Bandung yang berfokus pada pembahasan mengenai

²² Ngadisah, 11–15.

²³ Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020*, 110:30.

rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung, dan sejarah pembangunan gedung Kantor Pusat PTT di Bandung.

BAB III Dinamika Kantor Pusat Pos, Telegrap, dan Telepon (PTT) Di Bandung Tahun 1920 – 1945 yang berfokus pada pembahasan mengenai dinamika Kantor Pusat PTT dari masa Pemerintahan Belanda, Pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan.

BAB IV Kesimpulan, berisikan tentang analisis kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Pada bagian akhir terdiri atas daftar sumber dan lampiran-lampiran.

